

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN PENGELUARAN DAERAH TERHADAP KETIMPANGAN WILAYAH DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Disusun dan diajukan oleh:

**MUHAMMAD AYATUL AKBAR  
A011171012**



Kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN PENGELUARAN DAERAH TERHADAP KETIMPANGAN WILAYAH DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh:

**MUHAMMAD AYATUL AKBAR  
A011171012**



Kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

# SKRIPSI

## ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN PENGELUARAN DAERAH TERHADAP KETIMPANGAN WILAYAH DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Disusun dan diajukan oleh:

**MUHAMMAD AYATUL AKBAR**  
**A011171012**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan  
**Makassar, 25 Oktober 2022**

Pembimbing I



Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, SE, MA, CRP  
NIP. 19590306 198503 1 002

Pembimbing II



M. Agung Ady Mangilep, SE, M.Si  
NIP. 19740315 200312 1 002

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Dr. Sabir, S.E., M.Si., CWM®  
NIP. 19740715 200212 1 003

# SKRIPSI

## ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN PENGELUARAN DAERAH TERHADAP KETIMPANGAN WILAYAH DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Disusun dan diajukan oleh:

**MUHAMMAD AYATUL AKBAR**  
**A011171012**

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
Pada tanggal **22 November 2022**  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, SE., MA., CRP.	Ketua	1..... 
2.	M. Agung Ady Mangilep, SE, M.Si	Sekretaris	2..... 
3.	Dr. Indraswati T.A Reviane, SE.,M.Si.,CWM®.	Anggota	3..... 
4.	Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®	Anggota	4..... 



## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Ayatul Akbar  
Nomor Pokok : A011171012  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis UNHAS  
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul ***Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pengeluaran Daerah Terhadap Ketimpangan Wilayah Di Provinsi Sulawesi Selatan*** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak Cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 22 November 2022

Yang Menyatakan



**(Muhammad Ayatul Akbar)**

A011171012

## **PRAKATA**

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan kasihkarunia-Nya sehingga penyusunan skripsi yang Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pengeluaran Daerah Terhadap Ketimpangan Wilayah Di Provinsi Sulawesi Selatan dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini bukan hanya sebagai bentuk pemenuhan syarat untuk menyelesaikan studi serta untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, akan tetapi penulisan skripsi ini berangkat dari keresahan akan masalah perekonomian di lingkungan sekitar, yang kemudian dituangkan dalam sebuah karya penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis dengan jujur dan sepenuh hati oleh penulis sebagai wujud pengaplikasian ilmu yang telah penulis peroleh selama menjadi Mahasiswa.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu Penulis dengan senang hati menerima setiap kritik dan saran dari pembaca terkait tulisan ini, agar skripsi ini yang merupakan sebuah karya penulis menjadi sebuah tulisan penelitian yang berguna bagi masyarakat luas yaitu mampu memberikan banyak pembelajaran serta membangkitkan semangat untuk melahirkan karya-karya yang mendidik. Dalam penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari partisipasi beberapa pihak terkait yang telah mendukung Penulis secara penuh. Untuk itu, penulis merasa wajib menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada mereka secara khusus sebagai berikut:

1. Allah SWT atas kehendak dan kemurahan-Nya memberikan hati yang tulus, pemikiran, energi pada setiap proses penyelesaian tugas akhir ini.
2. Orang tua penulis, Ayahanda Nasaruddin S.pd, MM serta Ibunda Habiba, S.pd.i yang dalam kesederhanaan dapat menjadi teladan bagi penulis dan berhasil menjadi orang tua yang selalu mendidik, memotivasi dengan penuh cinta kasih. Terimakasih atas segala kepercayaan, doa serta restu yang diberikan sehingga memudahkan penulis dalam menghadapi setiap tahap kehidupan.
3. Bapak Dr. Sabir, S.E., M.Si., CWM® selaku ketua Departemen Ilmu Ekonomi dan Ibu Dr. Fitriwati Djam'an, S.E., M.Si. selaku sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi. Terimakasih atas segala bantuan yang senantiasa diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi di Departemen Ilmu Ekonomi.
4. Bapak Dr. Ir. Muhammad Djibril Tojibu, S.E., M.Si selaku penasihat akademik penulis. Terima kasih memberikan arahan kepada penulis selama berproses di bangku perkuliahan di Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, S.E, M.A., CRP selaku pembimbing I dan Bapak M. Agung Ady Mangilep, S.E M.Si Selaku pembimbing II. Terimakasih untuk setiap kritik,saran serta kesabaran dalam membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi.
6. Ibu Dr. Indraswati Tri Abdi Reviane, S.E., M.Si., CWM® dan Bapak Dr. Sabir, S.E., M.Si., CWM® selaku dosen penguji, terimakasih untuk pertanyaan-pertanyaan serta kritik dan saran membangun yang disampaikan pada saat seminar proposal dan ujian skripsi, dari hal tersebut Penulis banyak memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru.

7. Seluruh Dosen FEB-UH yang telah memberikan ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan, dan nasehat kepada Penulis selama menuntut ilmu di Universitas Hasanuddin.
8. Teman-teman ERUDITE terimakasih untuk setiap momen kebersamaan dan bantuan selama perkuliahan. Terkhusus "Anak Rektor" terimakasih atas persaudaraannya dan bantuan materi serta non materi yang diberikan kepada penulis sehingga bisa melalui proses perkuliahan dengan mudah dan sangat berkesan. Penulis merasa bersyukur dipertemukan dengan mereka dalam proses perkuliahan.
9. Kepada Aida Milasari terima kasih untuk semua support yang diberikan kepada penulis selama ini dalam membantu menyelesaikan Skripsi .
10. Teman – teman Kabinet Himajie Bersatu dan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Terima kasih atas kerja keras dan kerja sama serta keceriaan yang telah diberikan selama satu periode kepengurusan.
11. Kepada keluarga besar HIMAJIE FEB-UH yakni Kakak-kakak ESPADA, SPARK, PRIMES, ANTARES, SPHERE dan juga adik-adik LANTERN, GRIFFINS, RIVENDELL, dan SANCUARY terima kasih telah menciptakan momen-momen berharga dalam HIMAJIE yang akan selalu dikenang. Terimakasih atas segala kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk mengemban segala bentuk tanggung jawab dalam HIMAJIE. Rumah Merah HIMAJIE telah menjadi tempat terbaik untuk belajar dan berproses.
12. Kepada Sobat MEDKOMerz terimakasih untuk semua keceriaan dan semangat kebersamaan dalam mewujudkan Medkom agar tetap mengudara.



13. Dan tentunya kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang dengan tulus memberikan motivasi serta doa sehingga atas izin Allah SWT skripsi ini dapat terselesaikan.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran dan kritik bagi pembaca demikesempurnaan skripsi ini. Peneliti juga mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi kita semua. Aamiin.

Makassar, 22 November 2022

Muhammad Ayatul Akbar

## ABSTRAK

### ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN PENGELUARAN DAERAH TERHADAP KETIMPANGAN WILAYAH DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Muhammad Ayatul Akbar  
Abd. Hamid Paddu.  
M. Agung Ady Mangilep

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan pengeluaran daerah terhadap ketimpangan wilayah di provinsi Sulawesi Selatan. Adapun data yang digunakan yakni data *time series* dari tahun 2005 hingga 2021. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh negative dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah di provinsi Sulawesi Selatan serta pengeluaran daerah tidak berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah di provinsi Sulawesi Selatan

**Kata Kunci:** Ketimpangan Wilayah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF THE EFFECT OF REGIONAL TAXES, REGIONAL RETRIBUTIONS, AND GOVERNMENT EXPENDITURES ON REGIONAL INEQUALITY IN SOUTH SULAWESI PROVINCE**

Muhammad Ayatul Akbar  
Abd. Hamid Paddu.  
M. Agung Ady Mangilep

This study aims to analyze the effect of local taxes, regional fees, and regional expenditure on regional inequality in the province of South Sulawesi. The data used is time series data from 2005 to 2021. This study uses a multiple linear regression analysis method. The results of this study indicate that regional taxes and regional levies have a negative and significant effect on regional inequality in the province of South Sulawesi and regional expenditures have no effect on regional inequality in the province of South Sulawesi.

**Keywords:** Regional Inequality, Regional Taxes, Regional Retributions, Government Expenditure

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	9
2.1 Tinjauan Konseptual .....	9
2.1.1 Ketimpangan Wilayah .....	9
2.1.2 Pajak Daerah .....	12
2.1.3 Retribusi Daerah .....	15
2.1.4 Pengeluaran Pemerintah Daerah.....	19
2.2 Tinjauan Teoritis.....	22
2.2.1 Hubungan Antara Pajak Daerah Dengan Ketimpangan Wilayah .....	22
2.2.2 Hubungan Antara Retribusi Daerah Dengan Ketimpangan Wilayah.....	23
2.2.3 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Ketimpangan Wilayah .....	24
2.3 Studi Empiris .....	25
2.4 Kerangka Konseptual Penelitian .....	27
2.5 Hipotesis Penelitian.....	28
BAB III METODE PENELITIAN .....	29
3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	29
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	29
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	29
3.4 Metode Analisis Data.....	29
3.5 Definisi Operasional Variabel .....	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	34
4.1 Perkembangan Umum Vaeriable Penelitian .....	34
4.1.1 Perkembangan Ketimpangan Wilayah .....	34
4.1.2 Perkembangan Pajak Daerah .....	35
4.1.3 Perkembangan Retribusi Daerah .....	37
4.1.4 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Daerah .....	38

4.2 Hasil Estimasi Penelitian .....	39
4.3 Analisis dan Implikasi Hasil Penelitian .....	42
4.3.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Ketimpangan Wilayah .....	42
4.3.2 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Ketimpangan Wilayah .....	43
4.3.3 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Ketimpangan Wilayah .....	43
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>46</b>
5.1 Kesimpulan.....	46
5.2 Saran .....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>48</b>

## DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Indeks Williamson Sulawesi Selatan Tahun 2011 – 2020.....	10
TABEL 1.2 Pajak Daerah Kab/Kota dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2020 (Dalam Miliar).....	11
TABEL 1.3 Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2020 (Dalam Miliar).....	12
TABEL 1.4 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kab/Kota dan Provinsi Sulawesi Selatan 2011-2020 (Dalam Miliar).....	13
TABEL 4.1 Perbandingan Belanja Pegawai, Belanja Barang & Jasa, Serta Belanja Pegawai Provinsi Sulawesi Selatan .....	51

## DAFTAR GAMBAR

<b>GAMBAR 2.1 Keynesian Cross.....</b>	<b>27</b>
<b>GAMBAR 2.2 Kerangka Konseptual penelitian.....</b>	<b>34</b>
<b>GAMBAR 4.1 Indeks Williamson Sulawesi Selatan 2005-2021.....</b>	<b>38</b>
<b>GAMBAR 4.2 Pajak Daerah Sulawesi Selatan 2005-2021.....</b>	<b>40</b>
<b>GAMBAR 4.3 Retribusi Daerah Sulawesi Selatan 2005-2021.....</b>	<b>41</b>
<b>GAMBAR 4.4 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Sulawesi Selatan 2005-2021.....</b>	<b>42</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Karakteristik fisik dan sosial wilayah di Indonesia yang beragam memberikan berbagai potensi wilayah berbeda. Perbedaan potensi wilayah di Indonesia menyebabkan terjadinya kesenjangan, baik itu kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antar desa dan kota, maupun kesenjangan antara golongan pendapatan. Dalam setiap wilayah mempunyai ketersediaan sumber daya alam yang beragam. Untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat menggunakan sumber daya alam yang terdapat di setiap wilayahnya, namun jika tidak terpenuhi, akan memenuhinya dari wilayah lain yang terdapat sumber daya alam yang diperlukannya. Oleh sebab itu, antar wilayah terjalin hubungan dalam kaitan mengenai pemenuhan kebutuhan hidupnya. Hubungan seperti ini dalam perekonomian dapat digambarkan sebagai suatu proses penawaran dan permintaan. Wilayah yang memiliki sumber daya alam yang ada, mampu membuat wilayahnya memiliki ciri khusus dan berbeda dengan wilayah lain. Jika wilayah tersebut dapat menggunakan sumber daya yang tersedia dengan baik, maka wilayah tersebut akan mendapatkan nilai tambah bagi wilayahnya. Sehingga efek yang diperoleh yaitu menjadikan wilayahnya menjadi wilayah yang maju dan unggul. Hubungan timbal balik tersebut, dapat menjadikan hubungan yang saling mengisi satu sama lain. Dengan kondisi demikian, kedua wilayah yang saling melakukan interaksi akan memperoleh keuntungan ataupun manfaat dari hubungan tersebut.

Ketimpangan wilayah merupakan persoalan yang tidak akan pernah habis untuk didiskusikan sebab persoalan ini telah menjadi sebuah gejala ekonomi maupun sosial di hampir semua negara di dunia. Bukan hanya di negara-negara



sedang berkembang, di negara-negara maju pun tidak luput dari persoalan ketimpangan sebab ketimpangan merupakan efek dari pembangunan ekonomi. Pembangunan yang idealnya mendorong pertumbuhan dan menciptakan distribusi pendapatan yang merata tetapi kenyataannya malah menimbulkan ketimpangan. Ketimpangan wilayah dicirikan dengan adanya daerah yang lebih maju dan di sisi yang lain ada daerah yang terbelakang. Masalah ketimpangan menjadi persoalan besar dalam beberapa tahun belakangan ini sebab di beberapa negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat tetapi ketimpangan antar wilayahnya semakin melebar.

Persoalan ketimpangan wilayah banyak dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Beberapa ekonom mengatakan pertumbuhan ekonomi menjadi penyebab terjadinya ketimpangan. Tingginya pertumbuhan ekonomi menyebabkan melebarnya ketimpangan wilayah. Tetapi ada juga ekonom mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi malah mendorong turunnya ketimpangan wilayah. Teori pertumbuhan ekonomi Neoklasik yang dibangun oleh Solow (1956) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang akan mengakibatkan konvergensi, artinya pendapatan per kapita daerah-daerah sedang berkembang / terbelakang tumbuh lebih cepat dibanding dengan daerah-daerah maju sehingga ketimpangan antar daerah-daerah maju dengan daerah-daerah sedang berkembang akan menipis.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Kuznet (1955) bahwa di awal pembangunan, ketimpangan akan meningkat sampai pada satu titik dimana terjadi perkembangan teknologi dan industrialisasi maka ketimpangan wilayah akan menurun. Kemudian dipertegas lagi oleh Oshima (1992) bahwa sebagian besar negara-negara di Asia, puncak ketimpangannya terjadi di awal tahap pembangunan sebab tahap itu perekonomian masih didominasi oleh sektor pertanian. Selain terjadi ketimpangan antar provinsi dan antar pulau di Indonesia, ketimpangan wilayah pun terjadi antar kabupaten/kota dalam satu provinsi.

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan wilayah dengan Produk Regional Domestik Bruto yang cukup tinggi, bahkan menjadi yang tertinggi didalam Kawasan Indonesia Timur (KTI). Namun tingginya PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan juga dibarengi dengan tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah yang cukup tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dengan indeks Williamson di Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam mengukur ketimpangan pembangunan antar daerah dalam suatu wilayah dapat menggunakan Indeks Williamson yang digunakan dalam studi *Jeffrey G Williamson* pada tahun 1966. Istilah Indeks Williamson muncul sebagai pengguna awal dalam mengukur ketimpangan pembangunan antar daerah, Indeks Williamson memiliki pengertian dimana angka tersebut mendekati 1 berarti sangat timpang dan bila Indeks Williamson mendekati 0 berarti ketimpangan pembangunan tersebut merata.

**Tabel 1.1**  
**Indeks Williamson Sulawesi Selatan Tahun 2011 – 2020**

Tahun	Indeks Williamson
2011	0,590
2012	0,590
2013	0,588
2014	0,584
2015	0,583
2016	0,580
2017	0,581
2018	0,585
2019	0,593
2020	0,585

*Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)*

Berdasarkan gambar 1.1 ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2011-2020 semua menunjukkan angka ketimpangan yang cukup tinggi. Jika melihat grafik ketimpangan dari tahun 2011 sampai 2020 tergolong berfluktuasi antara 0,58-0,59 yang mengartikan bahwa ketimpangan pembangunan antar daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dalam periode 2011-2020 terbilang cukup tinggi mengingat angka indeks yang semakin mendekati angka 1 menunjukkan ketimpangan yang semakin lebar. Trend indeks Williamson di Provinsi Sulawesi Selatan masih kurang signifikan yang idealnya diharapkan semakin mengecil disebabkan oleh sumbangsi beberapa faktor diantaranya dari APBD yang komponen diantaranya yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan pengeluaran daerah.

**Tabel 1.2**  
**Pajak Daerah Kab/Kota dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2020**  
**(Dalam Miliar)**

TAHUN	PEM PROV	PEM KAB/KOTA	TOTAL
2011	1.729,1	482,9	2.211,9
2012	1.949,2	683,5	2.632,6
2013	2.235,5	895,8	3.131,2
2014	2.667,3	979,5	3.646,8
2015	2.902,2	1.212,8	4.115,1
2016	3.079,7	1.379,6	4.459,2
2017	3.241,7	1.765,7	5.007,4
2018	3.462,2	1.808,1	5.270,3
2019	3.719,6	2.023,7	5.743,3
2020	3.362,6	2.504,8	5.867,4

*Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)*

Pada tabel 1.2 menunjukkan penerimaan asli daerah yang bersumber dari total pajak daerah dari pemda dan pemprov dari 10 tahun terakhir mulai dari 2011 sampai dengan 2020 menunjukkan trend yang meningkat. Terlihat dari tahun 2011 peroleh

total pajak daerah sebesar 2,2 triliun sampai pada tahun 2020 total pajak daerah mencapai 5,8 triliun. Peningkatan penerimaan berupa pajak seperti inilah yang diharapkan mampu mendorong pemerintah untuk mengalokasikan pendapatan tersebut untuk mengurangi ketimpangan wilayah yang terjadi.

**Tabel 1.3**  
**Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2020**  
**(Dalam Miliar)**

TAHUN	PEM PROV	PEM KAB/KOTA	TOTAL
2011	111,6	370,2	481,8
2012	113,8	406,6	520,4
2013	60,5	430,5	491,0
2014	94,6	477,5	572,1
2015	94,1	595,8	690,0
2016	86,5	557,0	643,5
2017	82,3	561,8	644,1
2018	70,4	389,6	459,9
2019	40,9	428,6	469,5
2020	36,9	561,0	598,0

*Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)*

Tabel 1.3 memperlihatkan data penerimaan asli daerah yang bersumber dari retribusi. Tabe tersebut memperlihatkan total retribusi yakin dari pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. Untuk total retribusi daerah Provinsi Sulawesi selatan untuk 10 tahun terakhir dari 2011 sampai dengan tahun 2020 memperlihatkan trend yang berfluktuasi. Terlihat pada tahun 2011 mampu memperoleh total retribusi sebesar 481 miliar dan 2020 598 miliar. Untuk 10 tahun terakhir peningkatan perolehan retribusi paling tinggi terjadi pada tahun 2015 yakni 690 miliar dari pemda dan pemprov.

**Tabel 1.4**  
**Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kab/Kota dan Provinsi**  
**Sulawesi Selatan 2011-2020 (Dalam Miliar)**

TAHUN	PEM PROV	PEM KAB/KOTA	TOTAL
2011	3.401,1	17.265,2	20.666,3
2012	4.646,3	18.514,0	23.160,3
2013	5.017,4	21.485,6	26.503,0
2014	5.842,8	24.864,8	30.707,6
2015	6.415,6	29.938,8	36.354,4
2016	7.292,5	34.177,5	41.470,0
2017	9.220,5	33.151,1	42.371,6
2018	9.444,6	33.686,4	43.131,0
2019	9.631,0	35.495,4	45.126,4
2020	10.374,7	34.277,5	44.652,2

*Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)*

Berdasarkan Tabel 1.4 Belanja pemerintah daerah dan Provinsi Sulawesi Selatan selama 10 tahun terakhir yakni pada tahun 2011 sampai 2020 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Total pengeluaran atau belanja daerah 2011 menghabiskan anggaran sebesar kurang lebih 20 triliun dan 2020 sebesar 44 triliun lebih. Peningkatan penggunaan anggaran yang paling tinggi selama 10 tahun terakhir pernah terjadi pada tahun 2015 yakni 36 triliun lebih atau sebesar 18% dari tahun sebelumnya yakni 2014.

Belanja daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang terus meningkat mengindikasikan bahwa peran pemerintah untuk mendorong perekonomian juga cukup besar. Dengan adanya belanja daerah, maka proses pembangunan akan berjalan dengan lancar dan diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Dari gambaran di atas, nampaknya ada persoalan yang terjadi dimana ketimpangan antar wilayah di Sulawesi Selatan yang tidak kunjung mengalami perbaikan selama 10 tahun terakhir dan di satu sisi pajak daerah, retribusi daerah, dan pengeluaran pemerintah yang merupakan komponen dari APBD mengalami

peningkatan akan tetapi ketimpangan wilayah juga ikut meningkat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti “**Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pengaruh pajak daerah terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Bagaimana pengaruh retribusi daerah terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah daerah terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh :

1. Pajak daerah terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Retribusi daerah terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pengeluaran pemerintah daerah terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini yaitu untuk memberikan gambaran mengenai pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan, yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan terkait dengan upaya pemerataan pembangunan. Selain itu dapat pula dijadikan sebagaibahan perbandingan dan tambahan referensi untuk melengkapi referensi yang sudah ada bagi penulis atau peneliti lainnya.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Tinjauan Konseptual**

#### **2.1.1 Ketimpangan Wilayah**

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi geografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Sehingga kemampuan suatu daerah dalam proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu, pada setiap daerah terdapat wilayah maju dan wilayah terbelakang.

Perbedaan kemajuan antar wilayah yang berarti tidak samanya kemampuan untuk bertumbuh sehingga yang timbul adalah ketidakmerataan sehingga muncul pendapat dan studi-studi empiris yang menempatkan pemerataan dan pertumbuhan pada posisi yang dikotomis dalam hal ini (Kuznet, 1955) mengemukakan suatu hipotesis yang di kenal dengan sebutan *U Hypothesis*, hipotesa ini dihasilkan lewat kajian empiris terhadap pola pertumbuhan ekonomi terhadap *trade off* antara pertumbuhan dan pemerataan.

Kuznets (1957) dalam Tambunan (2003) mengemukakan suatu hipotesis yang terkenal dengan sebutan "Hipotesis U terbalik". Hipotesis ini dihasilkan melalui suatu kajian empiris terhadap pola pertumbuhan sejumlah negara didunia, pada tahap awal pertumbuhan ekonomi terdapat *trade-off* antara pertumbuhan dan pemerataan. Pola ini



disebabkan karena pertumbuhan pada tahap awal pembangunan cenderung dipusatkan pada sektor modern perekonomian yang pada saat itu kecil dalam penyerapan tenaga kerja. Ketimpangan membesar karena kesenjangan antar sektor modern dan tradisional meningkat. Peningkatan tersebut terjadi karena perkembangan di sektor modern lebih cepat dibandingkan dengan sektor tradisional. Akan tetapi dalam jangka panjang, pada saat kondisi ekonomi mencapai tingkat kedewasaan (*maturity*) dan dengan asumsi mekanisme pasar bebas serta mobilitas semua faktor-faktor produksi antar negara tanpa sedikitpun rintangan atau distorsi, maka perbedaan dalam laju pertumbuhan *output* antar negara akan cenderung mengecil bersamaan dengan tingkat pendapatan perkapita dan laju pertumbuhan rata-ratanya yang semakin tinggi di setiap negara, yang akhirnya menghilangkan kesenjangan.

Salah satu kajian yang menguatkan hipotesis Kuznet tersebut dilakukan oleh Williamson (1965) dalam Tambunan (2003). Williamson untuk pertama kalinya menyelidiki masalah ketimpangan antar daerah dengan membandingkan perhitungan *coefficient of variation (CV)* dengan jumlah penduduk menurut wilayah. Dalam studinya ia menemukan bahwa dalam tahap awal pembangunan ekonomi disparitas dalam pendapatan akan membesar dan terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu yang pada awalnya sudah relatif maju, misalnya dalam pembangunan industri, infrastruktur, dan SDM. Kemudian dalam tahap pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, terjadi konvergensi dan ketimpangan wilayah akan mengalami penurunan.

Ukuran ketimpangan wilayah untuk menganalisis seberapa besar kesenjangan antar wilayah/daerah, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan, dan dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah dengan melalui perhitungan Indeks Williamson. Weighted Coefficient Variation (CV) merupakan indeks variasi pendapatan antar daerah dalam suatu wilayah. Keunggulan koefisien variasi adalah mudah dan praktis untuk melihat disparitas antar daerah. Koefisien yang diperoleh dikenal sebagai koefisien variasi Williamsom. Dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan PDRB perkapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah. Pada dasarnya Indeks Williamsom merupakan koefisien persebaran (*coefficient of variation*) dan rata-rata nilai sebaran dihitung berdasarkan estimasi dari nilai- nilai PDRB dan penduduk daerah.

Ada banyak ukuran ketimpangan wilayah yang sering dipakai dalam berbagai penelitian tentang ketimpangan wilayah. Akan tetapi, dalam penelitian ini, penulis hanya menggunakan satu alat ukur saja yaitu Indeks Williamson sebab Indeks Williamson digunakan bukan hanya untuk mengukur ketimpangan antar negara tetapi juga ketimpangan antar daerah di suatu negara. Indeks Williamson ini diperkenalkan oleh Jeffry G Williamson, penghitungan nilai ini didasarkan pada indeks variasi (CV) dan Williamson memodifikasi perhitungan ini dengan menimbanginya dengan proporsi penduduk wilayah. Berbeda halnya dengan indeks gini yang menghitung nilai distribusi pendapatan seluruh rumah tangga dalam suatu daerah atau negara, indeks Williamson ini dapat melihat besarnya ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah dalam sebuah wilayah. Semakin besar angka indeks Williamson ini maka semakin besar pula tingkat ketimpangan yang

terjadi. Indeks Williamson ini dapat dihitung dengan rumus (Shankar dan Shah, 2003):

$$IW = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (Y_i - Y)^2 \frac{P_i}{P}}}{Y}$$

Keterangan:

$Y_i$  = Pendapatan per kapita daerah  $i$

$Y$  = Pendapatan per kapita seluruh daerah  $i$

$P_i$  = Jumlah penduduk daerah  $i$

$P$  = Jumlah penduduk seluruh daerah  $i$

Angka Indeks Williamson mempunyai hasil  $1 > IW > 0$  yang mengartikan semakin kecil atau mendekati nol menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil atau semakin merata dan sebaliknya angka yang semakin besar atau mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang semakin melebar.

### 2.1.2 Pajak Daerah

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Pajak adalah hak untuk mengusahakan sesuatu dengan membayar sewa kepada negara. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Definisi Prancis, termuat dalam buku *Leroy Beaulieu* yang berjudul *Traite de la Science des Finances*, 1906, berbunyi: "*L'impôt et la contribution, soit directe soit dissimulée, que La Puissance Publique exige des habitants ou des biens pur subvenir aux dépenses du Gouvernement*". ("pajak adalah

bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah”)

Definisi Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan adalah sebagai berikut: *“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”*, dengan penjelasan sebagai berikut: “dapat dipaksakan” artinya: bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti Surat Paksa dan sita, dan juga penyanderaan; terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa-timbal-balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi.

Definisinya yang kemudian dipertahankan (sebagai koreksi dari bagian pertama definisinya semula) dapat disimpulkan dari uraian dalam bukunya Pajak dan Pembangunan, 1974. Definisi tersebut kurang lebih dapat berbunyi *“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment”*.

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan tentang fungsi-fungsi pajak yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (Budgeter). Pajak merupakan sumber Pendapatan Negara, maka pajak berfungsi untuk membayar pengeluaran-pengeluaran daerah. Demi Perkembangan Daerah maka pengeluaran besar seperti pembangunan daerah dan biaya lainnya tidak dapat dihindari. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus memastikan keseimbangan antara pengeluaran tersebut dengan Pendapatan Daerah melalui Pajak.

2. Fungsi Mengatur (Regulasi). Pajak juga berfungsi untuk mengatur Pertumbuhan Ekonomi. Dengan Kebijakan Pemerintah, Pajak secara tidak langsung akan membantu ekonomi daerah dan masyarakatnya.

Fungsi Stabilitas. Dengan Pajak, Pemerintah dapat menjalankan kebijakannya yang berhubungan stabilitas Perekonomian Daerah. Jadi pajak dapat berfungsi untuk mengendalikan inflasi. Pemerintah dapat mengatur jumlah uang beredar akan menurun sehingga inflasi tidak akan terjadi. Sebaliknya, jika kondisi ekonomi negara dalam deflasi maka Pemerintah dapat menurunkan pajak.

3. Fungsi Redistribusi Pendapatan (Pemerataan). Pajak juga berfungsi sebagai pemerataan dari Pendapatan masyarakat dengan tujuan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. pajak dapat digunakan untuk membiayai kepentingan umum dan pembangunan sehingga menciptakan lapangan kerja yang baru, dimana ujung-ujungnya akan membantu Pendapatan masyarakat.

Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Pajak Provinsi, meliputi; a) Pajak kendaraan bermotor , b) Bea balik nama kendaraan bermotor, c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, d) Pajak air permukaan, dan d) Pajak rokok.
2. Jenis pajak Kabupaten/Kota meliputi; a) Pajak hotel, b) Pajak restoran, c) Pajak hiburan, d) Pajak reklame, e) Pajak penerangan jalan , f) Pajak mineral bukan logam dan batuan, g) Pajak parkir, h) Pajak air tanah, i) Pajak sarang burung wallet, j) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan k) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang

mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Setiap jenis pajak dan retribusi daerah yang diberlakukan di Indonesia harus berdasarkan dasar hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran pengenaan dan pemungutannya.

Pajak di Indonesia didasarkan pada Ketentuan Hukum atau Undang-Undang yang berlaku, yaitu Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23 A Undang-Undang Nomor Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 (Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia(DPR-RI) dan Presiden Republik Indonesia.

Disamping Undang-Undang tersebut, lebih khusus setelah diterapkannya otonomi daerah maka Pajak Daerah mempunyai legitimasi tersendiri, yakni Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan diperkuat oleh peraturan dari masing-masing daerah otonom.

### **2.1.3 Retribusi Daerah**

Menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi. Pada dasarnya retribusi sama langsung dapat dirasakan oleh pembayar. Unsur-unsur yang melekat dalam retribusi antara lain :

1. Pungutan retribusi harus berdasarkan Undang-Undang.
2. Pungutannya dapat dipaksakan.
3. Pungutan dapat dilakukan oleh negara.

4. Digunakan sebagai pengeluaran masyarakat umum.

Retribusi Daerah merupakan iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari Pemerintah dia tidak akan dikenakan iuran itu.

### ***Fungsi Dan Jenis Retribusi Daerah***

Retribusi memiliki fungsi yang sangat penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana fungsi tersebut diukur berdasarkan target capai pungutan Retribusi Daerah. Apabila target pencapaiannya tinggi, maka fungsi retribusi terhadap PAD akan tinggi. Berikut beberapa fungsi retribusi:

#### 1. Sumber Pendapatan Daerah

Jika Daerah telah memiliki sumber Pendapatan yang mampu memenuhi dan mencukupi kebutuhan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah pusat tidak memiliki beban berat dalam tujuannya turut serta membantu Pembangunan Daerah. Peran serta Pemerintah Pusat dalam hal pembangunan Daerah bisa berupa pemberian bantuan Daerah untuk pendidikan, keluarga miskin atau apresiasi sejenis tunjangan bagi tenaga Pemerintahan Daerah.

#### 2. Pengatur Kegiatan Ekonomi

Daerah Kegiatan ekonomi akan berjalan dan dapat diatur dengan baik jika sumber-sumber keuangan ada dan mencukupi. Demikian halnya dengan ekonomi di daerah, yang mana retribusi menjadi salah satu sumber keuangannya. Sehingga pengaturan kegiatan ekonomi daerah pada pos-pos tertentu dapat dijalankan dengan baik dan lancar.

### 3. Sarana Stabilitas Ekonomi Daerah

Retribusi yang masuk ke Kas Daerah secara rutin akan menjadikan Perekonomian Daerah pada posisi stabil ekonomi karena biaya-biaya penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah disokong oleh retribusi.

### 4. Pemerataan Pembangunan Dan Pendapatan Masyarakat

Jika poin-poin di atas terpenuhi dengan adanya retribusi, maka pemerataan pada pembangunan dan Pendapatan masyarakat akan tercapai yang sekaligus meningkatkan kesejahteraan serta taraf hidup masyarakat.

Retribusi Daerah dibagi menjadi tiga jenis, seperti yang tertuang dalam Undang- Undang nomor 28 tahun 2009 yaitu :

1. Retribusi Jasa Pelayanan Umum, yaitu Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum dan dapat dinikmati oleh umum baik perorangan ataupun badan. Yang termasuk jasa pelayanan umum yaitu : a) Retribusi pelayanan Kesehatan, b) Retribusi pelayanan kesampahan/kebersihan, c) Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil, d) Retribusi pemakaman dan pengabuan mayat, e) Retribusi pelayanan parkir, f) Retribusi pelayanan pasar, g) Retribusi pengujian kendaraan bermotor, h) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, i) Retribusi penggantian biaya cetak peta, j) Retribusi penyediaan/penyedotan kakus, k) Retribusi pengolahan limbah cair, l) Retribusi pelayanan tera/tera ulang, m) Retribusi pelayanan Pendidikan, n)



Retribusi pengendalian menara telekomunikasi, dan o) Retribusi pengendalian lalu lintas. Yang tidak termasuk dalam jasa ini adalah jasa urusan umum Pemerintah. Tarifnya ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspekkeadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya yang dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biayamodal.

2. Retribusi Jasa Usaha, yaitu pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, baik itu pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Yang termasuk retribusi jasa usaha yaitu; a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah, b) Retribusi pasar grosir/pertokoan, c) Retribusi tempat pelelangan, d) Retribusi terminal, e) Retribusi tempat khusus parkir, f) Retribusi tempat penginapan/villa, g) Retribusi rumah potong hewan, h) Retribusi pelayanan kepelabuhan, i) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga, j) Retribusi penyeberangan di air, dan k) Retribusi penjualan produk usaha Daerah. Tarif retribusi jasa usaha sendiri didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, dalam artian keuntungan diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

### 3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi ini merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan

pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, usaha, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Yang termasuk retribusi perizinan tertentu yaitu; a) Retribusi izin mendirikan bangunan (IMB). b) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, c) Retribusi izin gangguan, d) Retribusi izin trayek, e) Retribusi izin usaha perikanan, dan f) Retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga asing (IMTA). Tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biayanya meliputi dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, tata usaha, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

#### **2.1.4 Pengeluaran Pemerintah Daerah**

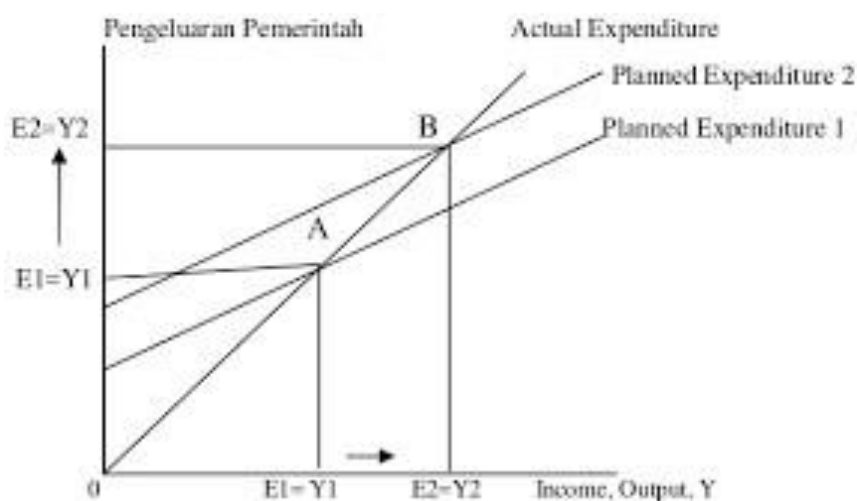
Belanja modal merupakan belanja pemerintah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah selain dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya, semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin buruk pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pada dasarnya setiap pengeluaran negara dilakukan atas landasan prinsip optimalisasi pemanfaatan dana untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan. Pengeluaran pemerintah harus mampu mencapai beberapa sasaran, seperti peningkatan produktivitas kerja aparatur pemerintah, perluasan jangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan serta terpeliharanya berbagai aset negara dan hasil-hasil pembangunan.

Pengeluaran pemerintah (Government Expenditure) adalah pengeluaran oleh pemerintah untuk membeli barang dan jasa. Sebagian

dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan atau pengeluaran rutin dan sebagian lainnya untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan atau pengeluaran pembangunan.

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesoebroto, 1993; 169). Hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi secara teori diterangkan dalam Keynesian Cross (Mankiw, 2003; 263).



**Gambar 2.1 Keynesian Cross**

Pada grafik 2.1 dapat dilihat peningkatan pengeluaran pemerintah berdampak pada kenaikan pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui pendapatan dan tingkat output. Peningkatan besarnya pengeluaran pemerintah berhasil merubah keseimbangan dari titik A ke titik B, yang berarti peningkatan pertumbuhan ( $Y$ ).

Peran pemerintah sangat diperlukan untuk mencapai keberhasilan pembangunan ekonomi. Pengeluaran pemerintah dapat dilihat melalui belanja daerah. Dalam pembangunan nasional anggaran pembangunan

lebih ditekankan pada pembangunan secara menyeluruh baik fisik maupun non fisik. Peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengurangan ketimpangan makin dirasa sangat penting. Salah satu usaha tersebut secara langsung bisa dirasakan masyarakat melalui anggaran belanja daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dana belanja daerah yang dialokasikan diharapkan dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dibareng dengan pengurangan ketimpangan antar daerah (Rosmeli, 2015).

Menurut Rostow dan Musgrave pada tahap awal perkembangan ekonomi, rasio investasi pemerintah terhadap investasi total (rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional) relatif besar. Hal ini disebabkan karena pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana. (Mangkoesoebroto,2000)

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, bersamaan dengan itu peran investasi swasta juga meningkat. Tetapi besarnya pengeluaran pemerintah pada tahap menengah ini dikarenakan oleh pada tahap ini banyak terjadi kegagalan pasar yang ditimbulkan dari perkembangan ekonomi itu sendiri sehingga pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik, selain itu juga banyaknya eksternalitas negatif yang timbul dan menuntut pemerintah untuk turun tangan mengatasinya.

Pada tahap lanjut Rostow berpendapat bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana kepada pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas-aktivitas sosial. Sementara menurut Musgrave, dalam suatu proses pembangunan rasio investasi

total terhadap pendapatan nasional semakin besar tetapi rasio investasi pemerintah terhadap pendapatan nasional semakin mengecil.

## **2.2 Tinjauan Teoritis**

### **2.2.1 Hubungan Antara Pajak Daerah Dengan Ketimpangan Wilayah**

Jika melihat Peraturan Menteri Keuangan RI tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Kapasitas Fiskal (KF) adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang di ceriminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu). Pasal (4) menjelaskan tentang perhitungan Kapasitas Fiskal (KF) yang komponen-komponennya dapat di ukur dari perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya dari pajak dan retribusi, Transfer yang bersifat umum (DAU, Bagi Hasil, Dana Otonomi Khusus, dan dana transfer lainnya) serta dari lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kapasitas Fiskal (KF) merupakan alat untuk melihat kemampuan suatu wilayah jika di masukkan kedalam rata-rata nasional untuk pendapatan daerah. Apakah daerah tersebut berada di bawah atau di atas ketentuan rata-rata nasional. Maka jelas bahwa kontribusi pajak dalam melihat kapasitas fiskal suatu wilayah dapat memberikan pengaruh terhadap ukuran ketimpangan wilayah.

Jika melihat teori secara umum, indeks Williamson yang menggunakan perhitungan PDRB perkapita dikaitkan dengan keuangan negara ataupun daerah yang dalam hal ini adalah pajak dengan asumsi bahwa pajak tidak berpengaruh langsung terhadap pengeluaran pemerintah karena pajak sifatnya *non earmarked*.

Hubungan antara pajak dan ketimpangan wilayah negative artinya pendapatan penerimaan pajak suatu daerah menyebabkan ketimpangan menjadi lebih kecil atau lebih baik karena pajak dengan asumsi *optimal taxation* yang mampu berdampak pada peningkatan pembangunan yang berdampak pada menurunnya tingkat ketimpangan

Hal inilah yang menjadi salah satu faktor pendorong bagi pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak terhadap masyarakat, dari pemasukan pajak tersebut digunakan untuk memenuhi pembangunan sektor riil yang telah direncanakan oleh pemerintah. Dengan harapan bahwa usaha pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama adalah dengan jalan menggali sumber dana dalam negeri yaitu berupa pajak dapat berjalan lancar dan rakyat dapat menikmati hasilnya.

### **2.2.2 Hubungan Antara Retribusi Daerah Dengan Ketimpangan Wilayah**

Retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Penggalan sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah, yang merupakan salah satu komponen dari PAD, diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan yang akan dialokasikan untuk meningkatkan pembangunan agar bisa menciptakan pemerataan pembangunan antar wilayah.

### **2.2.3 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Ketimpangan Wilayah**

Rostow dan Musgrave membuat model yang menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal, presentasi investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pada tahap ini, pemerintah harus menyediakan prasarana pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sebagainya. Kemudian, pada tahap menengah, investasi pemerintah masih diperlukan walaupun peranan investasi swasta sudah membesar. Peran pemerintah tetap besar, karena pada tahap ini peranan swasta banyak menyebabkan kegagalan pasar, sehingga pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik yang lebih banyak dengan kualitas yang lebih baik. Terakhir yaitu tahap lebih lanjut, dimana peran pemerintah beralih dari penyediaan prasarana menjadi pengeluaran untuk kegiatan sosial seperti program pensiun, pelayanan kesehatan, dan sebagainya.

Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan suatu daerah. Ketika belanja daerah dapat ditingkatkan untuk kegiatan yang bersifat pembangunan, maka diharapkan pembangunan di daerah berjalan lancar. Contohnya yaitu belanja untuk peningkatan pelayanan publik, belanja bantuan sosial, belanja peningkatan infrastruktur, dan sebagainya. Sehingga dengan meningkatnya belanja pemerintah daerah, maka proses pembangunan berjalan lancar dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan hal ini dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Tiebout menyatakan bahwa individu akan menunjukkan perspektifnya terhadap pemerintah lokal dengan cara berpindah ke wilayah yang dapat mencerminkan selera terbaik mereka dan

menawarkan benefit-tax yang paling dikehendaki. Inilah yang biasa dikenal dengan istilah voting with their feet (Cullis and Jones, 1998).

Tiebout menjelaskan hal tersebut pada fase pertama bahwa pajak yang tinggi yang dalam artian lebih dari *optimal taxation* masyarakat akan keluar dari suatu daerah dan lebih mencari daerah yang menyediakan fasilitas yang memadai dengan tingkat pungutan pajak yang stabil.

Berdasarkan hipotesis yang dikemukakan oleh Tiebout maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah harus meningkatkan pengeluaran untuk sektor publik contohnya pembangunan infrastruktur seperti jalan, pasar, lapangan kerja dan sebagainya diharapkan mampu meningkatkan ekonomi. Jika ekonomi maju, maka *Tax Base* sebagai dasar untuk meningkatkan kapasitas fiskal juga akan meningkat, yang akhirnya akan menurunkan ketimpangan pendapatan wilayah.

### **2.3 Studi Empiris**

Nina Roslina (2011) “ Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten dan kota di Indonesia periode tahun 2006-2010”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten dan Kota di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari tahun 2006-2010 yang diperoleh dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dengan jumlah 539 Kabupaten dan Kota. Metode analisis yang digunakan adalah dengan analisis regresi linier berganda dengan pengujian asumsi klasik.

Altito R. Siagian (2010) “Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Wilayah (Studi Kasus



Propinsi Jawa Barat)”. Hasil analisis menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan secara statistik sebesar 211.3880 terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada 25 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat. Sementara itu untuk ketimpangan wilayah, desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan signifikan secara statistik sebesar 287.8996 ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat. Selama 5 tahun pelaksanaan desentralisasi fiskal di Propinsi Jawa Barat secara empirik dapat dibuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi dari 25 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat meningkat tiap tahunnya, tetapi grafik pertumbuhan ekonomi meningkat tiap tahunnya justru meningkatkan ketimpangan wilayah yang terjadi antarkabupaten/kota di propinsi Jawa Barat.

Eranus Yoga Kundhani (2015) “Analiss Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Kesenjangan Ekonomi Antar Daerah”. Dari hasil pengolahan data panel untuk variabel Desentralisasi Fiskal, IPM, Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Ekonomi Antar Daerah, diperoleh temuan sebagai berikut :

Pertama, jika dibandingkan koefisien jalur, baik langsung maupun tidak langsung dan variabel Desentralisasi Fiskal terhadap kesenjangan ekonomi antar daerah, maka temua pada penelitian ini adalah bahwa variabel Desentralisasi Fiskal memiliki koefisien pengaruh yang besar terhadap kesenjangan ekonomi antar daerah, jika melalui variabel IPM.

Lailatul Hanifah (2018), “Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Wilayah Perkabupaten/Kota Di Provinsi Banten Tahun 2011-2016”. Hasil analisis menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pertmbhan ekonomi di provinsi Banten.

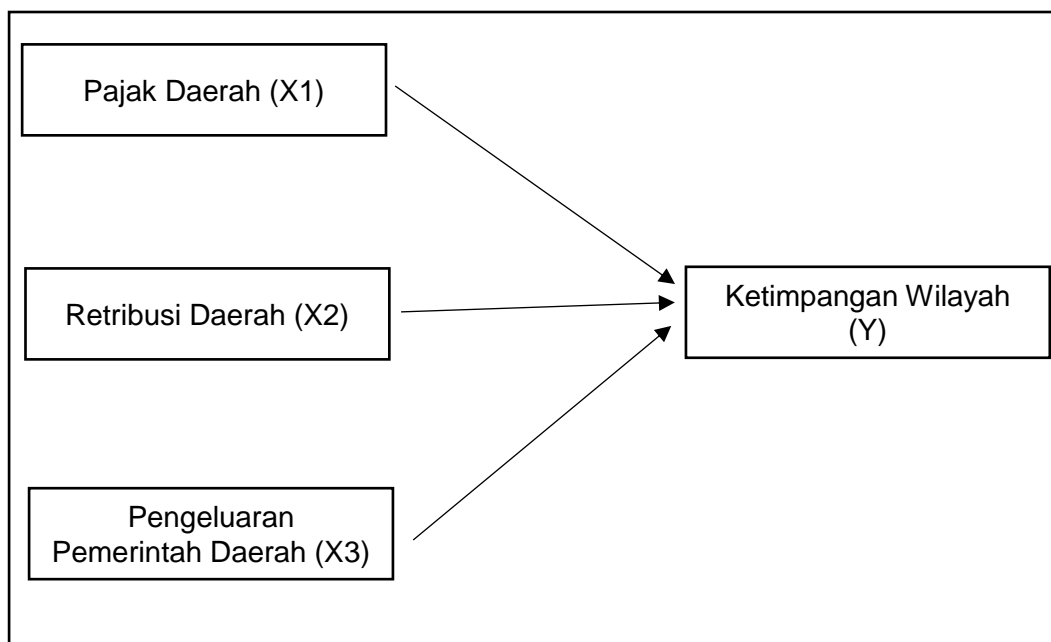
Sebaliknya, desentralisasi fiskal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan wilayah di 8 kabupaten/kota di provinsi Banten tahun 2011- 2016.

Aswar (2018), "Analisis Ketimpangan Wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2002-2016". Hasil dari penelitian ini menunjukkan rasio belanja daerah terhadap total belanja berpengaruh negatif dan signifikan secara langsung terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan dan berpengaruh positif dan signifikan secara tidak langsung terhadap ketimpangan wilayah melalui pertumbuhan ekonomi.

#### 2.4 Kerangka Konseptual Penelitian

Variabel dalam penelitian ini yaitu : Pemerataan Pembangunan (Y), Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2). Kerangka pemikiran ini tentang bagaimana Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dari penjelasan tersebut maka, kerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai mana pada Gambar 2.2 berikut



**Gambar 2.2 Kerangka Konseptual penelitian**

## 2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir penelitian pada Gambar 2.2 maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga pajak daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Diduga retribusi daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Diduga pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan.